

**IMPLEMENTASI KEWENANGAN KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT
DALAM PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN
LAHAN JALAN TOL DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

Nisa Riska Wahyu, 21150014, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Ilmu
Hukum, Universitas Dharma Andalas

ABSTRAK

Korupsi menjadi budaya di Indonesia setiap tahunnya, sebagaimana Indeks Persepsi Korupsi di Indonesia meningkat disetiap tahun. Korupsi merupakan permasalahan serius yang meningkat setiap tahunnya. Sedangkan hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang pemberantasannya. Salah satu upaya dalam pemberantasan korupsi itu dengan melakukan penyitaan terhadap aset pelakunya. Penyitaan ini juga diterapkan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam melakukan penyitaan aset terhadap kasus korupsi Pengadaan Lahan Jalan Tol di Kabupaten Padang Pariaman. Kasus ini merupakan tindak pidana korupsi dalam uang ganti rugi pengadaan jalan tol di Kabupaten Padang Pariaman. Rumusan masalah dalam penulisan meliputi: 1) Bagaimana implementasi kewenangan Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dalam melakukan penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi pada perkara pengadaan lahan jalan tol di Kabupaten Padang Pariaman?; 2) Apa saja kendala yang dihadapi jaksa dalam melakukan penyitaan barang hasil korupsi perkara pengadaan lahan jalan tol di Kabupaten Padang Pariaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan penyitaan aset oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat dan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan penyitaan aset oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Kendala tersebut antara lain lama proses pencarian info di Badan Pertanahan Nasional (BPN), Padang Pariaman dan upaya dalam menutupi aset yang dimiliki terdakwa.

Kata Kunci: Penyitaan Aset, Kejaksaan Tinggi, Tindak Pidana Korupsi.

**IMPLEMENTATION OF THE AUTHORITY OF THE WEST SUMATRA HIGH ATTORNEY
TO CONFISCATE ASSETS OF CRIMINAL ACTS OF TOLL ROAD LAND PROCUREMENT
CORRUPTION IN PADANG PARIAMAN DISTRICT**

Nisa Riska Wahyu, 21150014, Faculty of Law, Social Sciences and Humanities Law
Study Program, Dharma Andalas University

ABSTRACT

Corruption becomes a culture in Indonesia every year, as the Corruption Perception Index in Indonesia increases every year. Corruption is a serious problem that increases every year. Meanwhile, this has been regulated in Law Number. 31 of 1999 in conjunction with Law no. 20 of 2001 which regulates its eradication. One of the efforts to eradicate corruption is by confiscating the assets of the perpetrators. This confiscation was also implemented by the West Sumatra High Prosecutor's Office in confiscating assets in the Toll Road Land Procurement corruption case in Padang Pariaman Regency. This case is a criminal act of corruption in compensation money for toll road procurement in Padang Pariaman Regency. The formulation of the problem in writing includes: 1) How is the implementation of the authority of the West Sumatra High Prosecutor's Office in confiscating assets of perpetrators of criminal acts of corruption in toll road land acquisition cases in Padang Pariaman Regency?; 2) What are the obstacles faced by prosecutors in confiscating goods resulting from corruption in the toll road land procurement case in Padang Pariaman Regency. The aim of this research is to analyze the implementation of the authority to confiscate assets by the West Sumatra High Prosecutor's Office and identify the obstacles faced in this process. This research uses empirical juridical methods with a qualitative approach. The research conclusions show that the implementation of the authority to confiscate assets by the West Sumatra High Prosecutor's Office has been carried out in accordance with applicable statutory provisions, but still faces various obstacles in its implementation. These obstacles include the long process of searching for information at the National Land Agency (BPN), Padang Pariaman and efforts to cover up the assets owned by the defendant.

Keywords: Asset Confiscation, High Prosecutor's Office, Corruption Crimes.